

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Topik penelitian dengan variable terikatnya PDRB Perkapita, Pendidikan, Kemiskinan, Pengangguran, Gini Ratio, dan Investasi dapat dikembangkan menjadi sebuah topik penelitian dengan adanya beberapa topik penelitian terdahulu yang variable yang berkaitan sehingga memudahkan peneliti mengetahui pengaruh variable – variable tersebut,

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI):

1. Rossy Dwi Anita dan Didit Welly Udjiyanto (2024)

Penelitian ini berjudul “Determinants of Inclusive Economic Development: A Fixed Effect Model Approach”. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel 34 provinsi di Indonesia yang diambil dari BPS dan Bappenas. Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Selanjutnya variable PDRB Perkapita dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Sedangkan variable jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif (Anita & Udjiyanto, 2024).

2. Muftiyatul Azizah (2022)

Penelitian ini berjudul “Analysis of the Effect of the Gini Ratio, Percentage of Poor Population, GRDP, HDI, and Average Per Capita Expenditures on Development Inclusivity Index in Java Island”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah rasio gini, persentase penduduk miskin, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan rata-rata pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap

indeks inklusivitas pembangunan di Pulau Jawa. Metode yang digunakan adalah regresi data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari BPS dan Bappenas pada tahun 2014 hingga tahun 2020. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa faktor rasio gini, persentase penduduk miskin dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif . Sedangkan indeks pembangunan manusia dan pengeluaran per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks inklusivitas pembangunan di Pulau Jawa. (Azizah, 2022).

3. Aza Amalia, Lorentino Togar Laut , Emma Dwi Ratnasari (2023)

Penelitian ini berjudul “Analysis Of The Effect Of Open Unemployment Rate, Poverty, Average Years Of Schooling, And Per Capita Gross Domestic Product On Indonesia's Inclusive Economic Development In 2016-2021”. Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Rata-rata Lama Sekolah, dan PDRB Per Kapita terhadap pembangunan ekonomi inklusif Indonesia pada tahun 2016 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas). Analisis regresi data panel pada penelitian menggunakan pendekatan Partial Adjustment Model (PAM) melalui program E-views 10. Hasil temuan menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif Indonesia Indonesia tahun 2016-2021. Sebaliknya, pada variable rata-rata lama sekolah dan PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif Indonesia tahun 2016-2021 (Amalia et al., 2023).

4. Rivalda Putri Prawesti (2023)

Penelitian ini berjudul “Analisis Investasi Dan Peran Teknologi Informasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Jawa Timur”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investasi dan

teknologi informasi terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pengambilan data statistik yang berasal dari BPS dan Bappenas tahun 2016-2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa variable investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Sedangkan variable teknologi informasi juga menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Pengujian model secara simultan menunjukkan bahwa investasi dan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif (Prawesti, 2023).

5. Reza Rizki Ramadhan dan Yaya Setiadi (2019)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Modal Fisik dan Sumber Daya Manusia terhadap Indeks Inklusif di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan inklusif di Indonesia, diukur dengan indeks inklusivitas dan faktor-faktor pembangunan modal fisik dan sumber daya manusia yang memengaruhi. Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2011-2017, tingkat nilai indeks inklusivitas di Indonesia berada pada kategori sedang. Variabel pengembangan modal fisik berupa belanja modal pemerintah adalah signifikan secara statistik memengaruhi indeks inklusivitas Indonesia, sedangkan nilai investasi modal swasta tidak berpengaruh signifikan. Pengembangan sumber daya manusia variabel berupa TPAK, RLS, dan keluhan kesehatan berpengaruh signifikan secara statistik untuk indeks inklusivitas di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah pendidikan dan pengeluaran pemerintah kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

6. Ibnu Hidayat, Sri Mulatsih dan Wiwiek Rindayati (2020)

Penelitian ini berjudul “The Determinants of Inclusive Economic Growth in Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2011 hingga tahun 2017 dengan estimasi model Two Stage Least Square (2SLS). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor

yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2011 hingga 2017. Model persamaan simultan yang digunakan ialah metode Two-stage Least Square (2SLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor konsumsi rumah tangga, ekspor barang/jasa, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pendapatan per kapita, dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Sedangkan pengangguran terbuka dan impor barang/jasa memiliki pengaruh negatif. Peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 2% akan meningkatkan produk domestik regional bruto sebesar 1,5%, menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,0%, menurunkan kemiskinan sebesar 10,7% dan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 5,5% (Hidayat et al., 2020).

7. Ahmad Sejati (2024)

Penelitian ini berjudul “Determinan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran belanja fungsi pendidikan, gini rasio, dan indeks demokrasi terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan model analisis regresi data panel menggunakan metode fixed effect model dengan periode tahun 2017- 2021 dan 34 Provinsi di Indonesia. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa variabel anggaran belanja pendidikan dan gini ratio memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif dan variabel indeks demokrasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif (Sejati, 2024).

B. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Ekonomi Inklusif

a. Definisi Pembangunan Ekonomi Inklusif

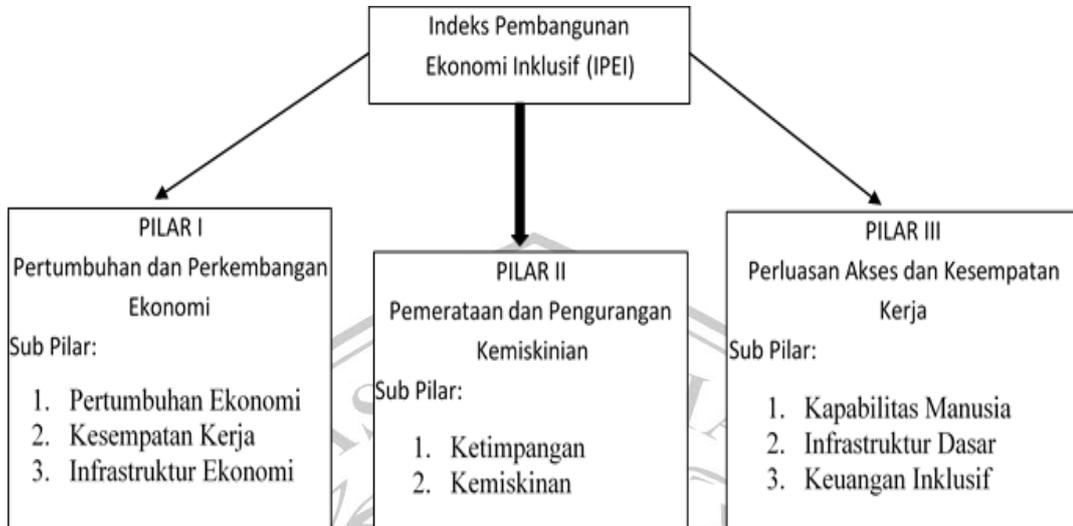
Menurut *World Economic Forum* (WEF), Pembangunan ekonomi inklusif merupakan upaya peningkatan perputaran perekonomian dengan cara memberikan akses yang luas kepada masyarakat, dalam rangka untuk menciptakan kemakmuran ekonomi. Namun definisi menurut WEF ini

tidak dengan mudah dapat diimplementasikan di negara Indonesia. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal budaya dan kondisi sosial, serta faktor seperti disparitas yang ada di negara Indonesia.

Kemudian, mulai tahun 2011 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif tingkat nasional. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, diharapkan dapat digunakan untuk mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan yang lebih inklusif. Menurut Bappenas sendiri, pembangunan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang secara adil dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh golongan masyarakat, serta dapat mengurangi ketimpangan yang ada di antara kelompok maupun wilayah.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur pembangunan tidak hanya melalui pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga melalui aspek sosial ekonomi lain, sesuai yang termuat dalam 21 indikator yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat mendorong arah pembangunan menjadi lebih inklusif (Mujahid Shaleh, 2021). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.

Gambar 2.1 Pilar dan Sub-Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022

Gambar diatas adalah pilar-pilar yang ada pada Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia. Berdasarkan poin poin diatas, bappenas juga memberikan skala 1 – 10 untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi inklusif.

- 1) 1 – 3 menggambarkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif kurang memuaskan.
- 2) 4 – 7 menggambarkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif sudah baik atau memuaskan.
- 3) 8 – 9 menggambarkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif sangat baik atau sangat memuaskan.

Pembahasan terkait pembangunan inklusif kini semakin menarik, manakala disebutkan dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke 8, yaitu berusaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Saat ini berbagai indikator dan metode yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi inklusif masih terus dikembangkan.

b. Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif

Dalam teori ekonomi pembangunan dapat dikatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sering menimbulkan tradeoff. Apabila program pembangunan dititik beratkan pada pertumbuhan, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi, tetapi tidak diikuti oleh pemerataan dan distribusi pendapatan, dimana dapat dikatakan mengalami ketimpangan. Jika pembangunan lebih fokus pada pemerataan, distribusi pendapatan akan menjadi lebih baik, namun pertumbuhan ekonomi lebih cenderung melambat (Lestari et al., 2021).

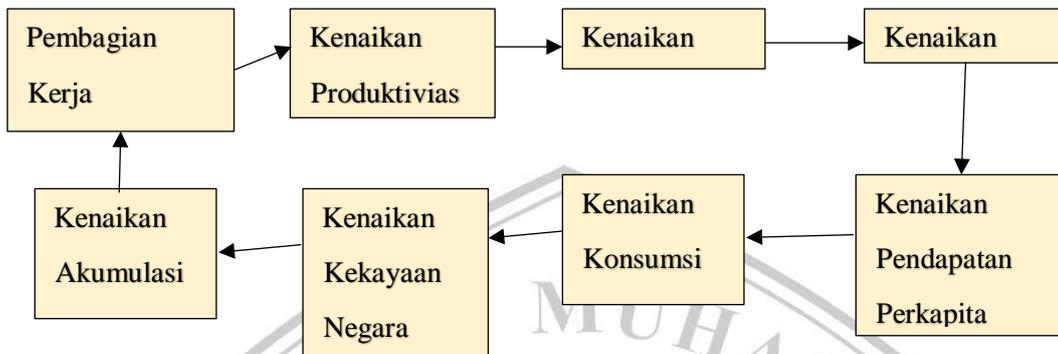
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan pembangunan ekonomi inklusif oleh beberapa ahli ekonom. Teori tentang pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh beberapa ahli ini merupakan implementasi keterkaitan indikator penelitian terhadap pembangunan ekonomi inklusif, berikut pemaparannya;

1) Teori Adam Smith

Teori-teori ekonomi yang dikemukakan oleh Smith pada dasarnya menjadi pondasi bagi sistem ekonomi pembangunan dari segi mikro dan juga makro. Pemikiran Smith mengenai pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari pembagian kerja. Pembagian kerja ini akan menentukan sejauh mana factor-faktor produksi akan dapat digunakan dan seberapa banyak output dihasilkan dari factor-faktor produksi tersebut. Penggunaan factor-faktor produksi (khususnya tenaga kerja) mengacu pada teori tentang nilai tenaga kerja. Dalam hal ini individu akan bekerja maksimal manakala insentif yang diterimanya sesuai dengan kepentingan (interest) dan pemenuhan kebutuhan hidupnya (utility/satisfy). Adanya insentif yang “memadai” tersebut akan dapat mendorong kenaikan produktifitas tenaga kerja

(Imam, 2019). Secara ringkas dibawah ini merupakan implementasi sederhannya teori dari adam smith;

Gambar 2.2 Alur Proses Pembangunan Ekonomi Adam Smith



Kenaikan produktifitas ini akan dapat meningkatkan output. Output yang tinggi akan mendorong produsen untuk memberikan insentif upah yang semakin tinggi bagi tenaga kerja. Bagi tenaga kerja kenaikan upah ini akan meningkatkan pendapatan perkapitanya. Kenaikan pendapatan per kapita ini akan mendorong kenaikan dalam hasrat konsumsi (propensity to consume) masyarakat. Kenaikan konsumsi ini akan menyebabkan kekayaan negara menjadi semakin besar (greater wealth of nation). Peningkatan kekayaan ini akan meningkatkan akumulasi modal dan kenaikan akumulasi modal ini akan menyebabkan perubahan dalam pembagian kerja (divison of labor).

2) Teori Amartya Sen

Dalam era globalisasi peningkatan pendapatan perkapita atau Gross Domestic Product (GDP) selalu dijadikan ukuran pembangunan ekonomi, padahal kenyataannya kesenjangan sosial sering mengiri pembangunan apabila terjadi ketidakmerataan dalam pendistribusiannya. Hal tersebut disebabkan karena ketidakmerataan mendapatkan akses terhadap asset-asset produksi serta keterbatasan pilihan dan kesempatan pada masyarakat. Maka terjadilah fenomena kemiskinan, kelaparan, ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi.

Teori ekonomi pembangunan yang dikembangkan oleh Amartya Sen meliputi beberapa aspek penting yang berfokus pada pemahaman dan

analisis proses pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Dasar pemikiran Amartya Sen yaitu pembangunan sebagai kebebasan. Dalam bukunya yang berjudul "Development as Freedom," terdapat empat elemen penting, yaitu peningkatan produktivitas, kesetaraan peluang, keberlanjutan pembangunan, dan pemberdayaan manusia.

Maksud dari pembangunan sebagai kebebasan yang dikembangkan oleh Sen ini secara garis besar menekankan pada pendidikan, modal individual yang kuat pada masyarakatnya dengan perolehan kesetaraan akses yang sama, pemerataan pembangunan dengan menyeimbangkan beberapa aspek sosial dan psikologis pada suatu wilayah sehingga akan berdampak peningkatan PDRB perkapita yang merata. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi inklusif yang sedang terjadi di negara Indonesia. Dalam sintesis, model persamaan Amartya Sen tidak ada dalam bentuk matematis yang spesifik seperti model-model pertumbuhan ekonomi lainnya.

Namun, konsepnya tentang pembangunan sebagai kebebasan dan kemampuan individu untuk mencapai keadaan yang layak memberikan kerangka berpikir yang lebih luas dan inklusif tentang pembangunan ekonomi.

2. PDRB Per Kapita

a. Definisi PDRB Per Kapita

Nilai PDRB adalah salah satu indikator untuk menentukan keberhasilan perekonomian dan pembangunan suatu daerah. PDRB menurut (Todaro & Smith, 2011) merupakan jumlah nilai keseluruhan yang dihasilkan dari suatu kegiatan perekonomian disuatu daerah, baik dilakukan oleh penduduk asli maupun penduduk daerah lain yang berada pada daerah tersebut.

PDRB per kapita menurut Kuncoro (2015) perbandingan nilai PDRB dengan jumlah penduduk secara keseluruhan bermukim disuatu daerah.. Dalam menghitung PDRB per kapita menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di daerah tersebut. Menurut BPS terdapat tiga pendekatan dalam menghitung PDRB:

a) Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan ini PDRB digambarkan dengan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut kurang biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor dalam jangka waktu tertentu.

b) Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang berkontribusi dalam proses produksi dalam periode tertentu. Pendekatan ini dimana pendapatan nasional diperoleh dari jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang berkontribusi terhadap produksi. Pendapatan nasional adalah total dari berbagai elemen dan jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Kompensasi untuk pekerja, mencakup gaji dan upah ditambah elemen lain yang berhubungan dengan upah dan gaji.
- 2) Keuntungan perusahaan, berupa kompensasi yang diberikan kepada pemilik bisnis untuk membayar pajak keuntungan perusahaan, dividen yang diberikan kepada pemegang saham, serta laba yang disimpan oleh perusahaan sebagai keuntungan yang tidak dibagikan.
- 3) Pendapatan perorangan meliputi kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber daya dari pekerja mandiri, profesional mandiri, dan sejenisnya.
- 4) Pendapatan sewa, yaitu kompensasi yang diberikan kepada pemilik tanah, bisnis rental, dan properti residensial.
- 5) Bunga netto, yaitu bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dikurangi bunga yang diterima dari luar negeri, tanpa memasukkan bunga yang dibayar oleh konsumen dan pemerintah.

a) Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan ini dimana menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan suatu perekonomian berdasarkan harga pasar yang berlaku, atau secara singkat dari penjumlah semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponennya adalah:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari laba.
- 2) Pengeluaran pemerintah.
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- 4) Perubahan stok.
- 5) Ekspor netto.

Selain cara perhitungannya, terdapat dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu PDRB atas harga Konstan (ADHK) dan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB).

a) Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan

PDRB atas harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nilai pada PDRB atas dasar konstan digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, dimana faktor perubahan harga telah dikeluarkan.

b) Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga yang Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku digunakan untuk mengamati perubahan struktur ekonomi.

b. Teori PDRB Perkapita

Teori klasik dari Adam Smith, beliau adalah seorang filsuf ekonomi terkenal, mengembangkan teori yang dikenal sebagai “invisible hand” (tangan tak kasat mata) dalam karyanya yang terkenal, “The Wealth of Nations”. Konsep ini menyatakan bahwa dalam suatu sistem pasar yang bebas, tindakan individu yang bermotivasi oleh kepentingan diri mereka sendiri secara tidak langsung akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun individu bertindak demi kepentingan pribadi, hasil akhirnya akan menguntungkan semua orang melalui mekanisme pasar yang efisien. (NAZMUDIN, 2005).

Pada dasarnya teori ekonomi ini memperlihatkan terbentuknya harga karena adanya interaksi antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) atau mekanisme pasar. Dengan demikian keseimbangan harga menurut teori (invisible hand) ini akan menggerakkan demand dan supply sehingga terciptalah keseimbangan harga kosntan.

3. Pengangguran

Pada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi, jenis-jenis, teori, serta hubungannya dengan pembangunan ekonomi inklusif.

a. Definisi Pengangguran

Pengangguran yang disebut juga dengan Tuna Karya, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak (Marini & Putri, 2020).

Pengangguran ini termasuk dalam masalah makroekonomi yang dapat memengaruhi secara langsung hidup manusia, karena hilangnya pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan dapat menurunkan standar kehidupan. Oleh sebab itu, pengangguran seringkali menjadi pembahasan yang diperdebatkan dalam dunia politik, dimana politisi cukup sering menjanjikan kebijakan yang akan menciptakan lapangan kerja baru.

Peningkatan lowongan pekerjaan yang tidak lebih tinggi dari peningkatan tenaga kerja akan menyebabkan pengangguran meningkat. Pengangguran jenis ini disebut dengan pengangguran terbuka (Dewi, 2017). Oleh karena itu, fenomenan ini akan diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak mendapat pekerjaan. Kondisi seperti ini dapat memberikan efek jangka panjang. Sehingga tenaga kerja yang tidak mendapat pekerjaan akan secara nyata dan separuh waktu menganggur.

Tingkat pengangguran terbuka sendiri adalah salah satu dari indikator sosial yang menggambarkan pencapaian pembangunan suatu wilayah yang dilihat dari sisi ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran

terbuka ialah persentase total penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja yang ada dalam suatu wilayah (BPS, 2022). Angka tingkat pengangguran terbuka yang nilainya semakin kecil akan menggambarkan keberhasilan dalam pembangunan khususnya di bidang ketenagakerjaan.

c. Teori-teori pengangguran

Adapun teori mengenai pengangguran terhadap pembangunan ekonomi yaitu teori Keynes Menurut Teori Keynes permasalahan pengangguran disebabkan oleh adanya permintaan agregat yang rendah. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang terhambat tidak dikarenakan oleh rendahnya produksi melainkan oleh rendahnya konsumsi. Ketika tenaga kerja meningkat, maka upah akan turun dimana hal ini merugikan bukan menguntungkan. Hal ini terjadi dikarenakan penurunan upah juga akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang, sehingga produsen menjadi rugi dan tidak bisa menyerap tenaga kerja. (Saputra, 2012)

4. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana individu atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, dan papan). Kemiskinan menurut Soejono Soekanto (2013:260) merupakan suatu kondisi dimana terjadi kekurangan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum, selain itu tidak adanya akses pendidikan dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat mengatasi kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak di masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dipandang sebagai kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan pengeluaran.

Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok atau standar hidup minimum, dan suatu

kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk mendayagunakan dirinya untuk kesejahteraannya. Kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, keluarga dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan standar hidup.

Todaro dan Smith (2011) berpendapat bahwa kemiskinan dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu ;

- 1) Kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat dengan pendapatan dibawah garis kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- 2) Kemiskinan relatif adalah jumlah masyarakat yang hidup dalam taraf rendah jika dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut BPS, ukuran kemiskinan dapat dilihat dari nilai *Head Count Index (HCI)*. *Head Count Index* adalah persentase dari penduduk hidup dibawah garis kemiskinan.

Metode Perhitungan Head Count Indeks;

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

Sumber : BPS, 2022

Keterangan ;

P_0 : Persentase penduduk miskin

Z : Garis kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan :

$y_i y_{i < z} q$: Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

b. Teori Kemiskinan

Dalam Teori trickle-down effect menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menurunkan

kemiskinan. Oleh karena itu, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan bersifat negatif. Artinya, kemiskinan akan berkurang secara signifikan jika penduduk miskin memperoleh sebagian besar manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Namun tidak bisa dipungkiri dalam prakteknya, Trickle Down Effect seringkali tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa keuntungan yang diperoleh oleh kelompok atas tidak pernah "menetes" ke bawah, dan malah memperburuk ketimpangan ekonomi dan justru meningkatkan kemiskinan (Anita & Udjianto, 2024).

5. Gini Ratio

a. Definisi Gini Ratio

Gini ratio atau koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara. Angka ini berkisar antara 0 hingga 1. Gini ratio bernilai 0 menunjukkan bahwa adanya distribusi pendapatan yang sempurna, dan bernilai 1 menunjukkan bahwa adanya ketimpangan yang sempurna. Gini ratio didasarkan pada pengukuran kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel pendapatan dengan distribusi pendapatan penduduk. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal (garis pemerataan sempurna) maka semakin timpang atau tidak meratanya distribusi pendapatan. Semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan maka bentuk kurva Lorenznya akan mendekati sumbu horizontal bagian bawah. Jika kurva Lorenz semakin mendekati garis diagonal berarti ketimpangan semakin kecil (Mardinsyah & Sukartini, 2020).

Ketimpangan atau kesenjangan dari pendapatan ini merupakan tolak ukur dari distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu. Kecenderungan dari kenaikan tren ketimpangan pendapatan tersebut terjadi baik di level nasional, perkotaan, pedesaan, juga di semua wilayah provinsi di Indonesia. Di dalam perkotaan, ketimpangannya cenderung lebih besar daripada di suatu

pedesaan, demikian juga yang terjadi di kota-kota besar (Khoirudin & Musta'in, 2020).

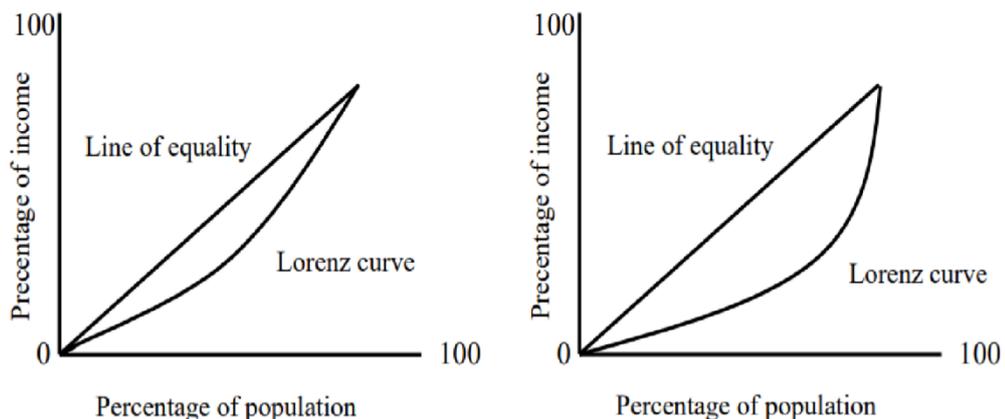
Rumus menghitung nilai Gini Rasio atau Indeks Gini yaitu :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$$

Keterangan :

- GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)
- P_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
- F_i : Frekuensi kumulatif dalam kelas pengeluaran ke-i
- F_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Gambar 2.3 Kurva Lorenz



Ketika distribusi pendapatan itu berbeda maka pertumbuhan ekonomi tidak akan inklusif. Proses pertumbuhan ekonomi inklusif menggambarkan tentang distribusi pendapatan yang mendukung dalam inklusivitas ekonomi. Jika pendapatan yang tidak terdistribusi secara merata menyebabkan ketimpangan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi harus mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi. Dalam mengatasi permasalahan ini haruslah fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan dan menyetarakan pendapatan.

b. Teori Gini Ratio

Teori ketimpangan distribusi pendapatan pertama kali muncul karena suatu hipotesis yaitu hipotesis “U-terbalik” yang dicetuskan oleh

Simon Kuznet pada tahun 1955. Simon menyatakan bahwa pertama kali pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan tidak merata. Namun, setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan akan semakin merata. Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap ketimpangan ekonomi mempunyai hubungan yang positif. Menurut hipotesis “U-terbalik” ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun apabila pendapatan per kapita masyarakat mengalami peningkatan (Todaro & C.Smith, 2006).

6. Pendidikan

a. Definisi Pendidikan

Menurut tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia (Nasional, 2008) pendidikan adalah proses pengebahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewaskan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut tim redaksi longman advanced dictionary american (GROUP, 2007) pendidikan adalah proses untuk mengembangkan pikiran seseorang melalui belajar di sekolah atau perguruan tinggi. Tinggi rendahnya pendidikan formal yang telah ditamatkan oleh penduduk suatu negara dapat tergambar secara jelas melalui rata-rata lama sekolah. Semakin rendah rata-rata lama sekolah itu artinya semakin rendah pula jenjang pendidikan yang telah mereka jalani. Pendidikan sendiri ialah bentuk investasi modal manusia yang menjadi prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan (Mintari, 2015).

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah rata-rata tahun yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan formal yang pernah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas (BPS, 2022). Indikator ini terhitung dari tingkat pendidikan tinggi yang telah ditamatkan dan juga dari tingkat pendidikan yang saat ini sedang dijalani. Rata-rata lama sekolah sendiri merupakan indikator yang dapat menggambarkan kisaran rata-rata jumlah tahun yang efektif atau jumlah tahun standar untuk menyelesaikan sekolah yang dapat ditamatkan oleh penduduk. Seperti

misalnya, dibutuhkan waktu 9 tahun untuk menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMP, dan 12 tahun untuk tamat SMA. Namun perhitungan rata-rata lama sekolah ini tidaklah memerhatikan kemungkinan seorang menyelesaikan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

Waktu diperlukan untuk dapat menyelesaikan pendidikannya setinggi mungkin agar dapat memaksimalkan keuntungan yang diharapkan, dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Investasi terhadap modal manusia dianggap lebih efektif dan menguntungkan apabila diperhitungkan berdasarkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dalam menjalani pendidikan yang hasilnya didapat setelah menamatkan proses pendidikannya, dan bersiap untuk mulai bekerja.

b. Teori Pendidikan

Terdapat beberapa teori yang mengemukakan bahwa pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, salah satunya adalah Teori Modal Manusia. Teori ini menjelaskan bagaimana pendidikan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi. Teori ini menjadi dominan dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi dan pendidikan pasca Perang Dunia II hingga tahun 1970-an. Beberapa tokoh yang dikenal sebagai pelopor teori modal manusia antara lain Gary Becker dari Universitas Chicago, yang meraih Nobel Ekonomi, serta Edward Denison dan Theodore Schultz, juga penerima Nobel Ekonomi, atas penelitian mereka terkait masalah ini. Para pendukung teori ini berargumen bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang diukur berdasarkan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah.

Jika upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memperoleh pendidikan tinggi, semakin tinggi pula produktivitas yang tercipta. Dengan demikian, pembangunan ekonomi secara nasional akan mengalami peningkatan yang lebih besar (Ritonga, 2021).

7. Investasi

a. Definisi Investasi

Menurut Agung Sudjati Winata, (2018), investasi berupa Penanaman Modal Asing (PMA) didefinisikan sebagai salah satu sumber dana yang dapat digunakan sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Dalam negara berkembang, PMA mempunyai peranan yang penting bagi pertumbuhan perekonomian di negara berkembang tersebut. Kegiatan penanaman modal asing sendiri merupakan segala bentuk kegiatan menanamkan modal yang dilakukan oleh investor asing untuk mendirikan usaha di wilayah negara Indonesia. Penanam modal sendiri dapat berupa perseorangan, badan usaha, maupun pemerintah.

Penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing yaitu kegiatan arus modal yang didapatkan dari pihak luar yang bergerak ke bidang dari Investasi Asing. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengartikan Penanaman Modal Asing seperti investasi yang dijalankan oleh perusahaan di dalam negara terhadap perusahaan di negara lain demi keperluan mengelola operasi perusahaan di negara tersebut. Di Indonesia penanaman modal asing terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Investasi Asing Langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) dan Investasi Asing Tidak Langsung atau Investasi Portofolio Asing.

Investasi berupa Penanaman Modal Asing Langsung adalah bentuk cara membeli, membangun atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman modal secara langsung ini dianggap lebih efisien karena sifatnya yang jangka panjang, dan dinilai memberikan kontribusi dalam keterampilan manajemen, transfer teknologi, dan pembukaan lapangan kerja baru (Rahutami & Kurniasari, 2018).

Sedangkan Investasi Asing Tidak Langsung dilakukan melalui instrumen surat berharga seperti misalnya obligasi dan saham. Berbeda dengan investasi asing langsung, dalam investasi portofolio dana yang masuk ke dalam perusahaan penerbit surat berharga (emiten), belum tentu

membuka lapangan pekerjaan baru, karena biasanya sifatnya hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin untuk membayar hutang bank.

b. Teori Investasi

Dalam penelitian (Agung Sudjati Winata, 2018) teori investasi yang sangat relevan tentang pembangunan ekonomi adalah teori endogen. Teori endogen ini menekankan pada investasi modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan merujuk pada pembangunan ekonomi inklusif yang sedang terjadi di Indonesia. Ada keterkaitan tentang pengaruh investasi berupa penanaman modal asing sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

C. Hubungan PDRB Per kapita Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Meningkatkan pertumbuhan perorangan adalah suatu yang mendasar dalam memajukan ekonomi yang inklusif, karena merupakan dasar dalam menciptakan dan memperluas peluang ekonomi (McKinley, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan Terry McKinley, (2010) yang menggunakan pertumbuhan PDB sebagai salah satu indikator dalam indeks inklusivitas, dengan hasil hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks inklusif berbeda-beda setiap negara, ada yang berhubungan positif, negatif, dan tidak ada pengaruh.

Selain itu, adanya pembangunan yang inklusif diharapkan dapat meningkatkan perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi. Menurut Bappenas

disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan syarat mutlak dalam keberhasilan pembangunan. Maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Temuan ini didukung oleh penelitian (Amalia et al., 2023) pada variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2016-2021. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variable PDRB per Kapita yang mengacu pada Pilar ke I, Sub pilar pertama IPEI yaitu indikator pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga variable PDRB per Kapita dapat diasumsikan bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

D. Hubungan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Permasalahan pengangguran disebabkan oleh adanya permintaan agregat yang rendah. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang terhambat tidak dikarenakan oleh rendahnya produksi melainkan oleh rendahnya konsumsi. Ketika tenaga kerja meningkat, maka upah akan turun dimana hal ini merugikan bukan menguntungkan. Hal ini terjadi dikarenakan penurunan upah juga akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang, sehingga produsen menjadi rugi dan tidak bisa menyerap tenaga kerja (Saputra, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan (Amalia et al., 2023) menggunakan variable Pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, menunjukkan hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan inklusif Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel pengangguran berupa tingkat pengangguran terbuka yang dalam pengambilannya variabelnya mengacu pada pilar ke 1, sub pilar kedua IPEI (*Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif*) yaitu kesempatan kerja sehingga dapat diasumsikan bahwa variable

Pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

E. Hubungan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tujuan dari adanya pembangunan ekonomi inklusif adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dyah Hapsari et al., 2013) menunjukkan bahwa fenomena pertumbuhan ekonomi inklusif dapat membantu mengurangi kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan lebih banyak kesempatan lapangan kerja di wilayah Indonesia Bagian Barat dibandingkan dengan wilayah Indonesia Bagian Timur. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat et al., 2020) dan (Anita & Udjiyanto, 2024) yang menggunakan variabel kemiskinan dengan indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin. Hasil menunjukkan bahwa pada jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel kemiskinan berupa jumlah penduduk miskin dalam pengambilan variabel mengacu pada Pilar ke II, sub pilar kedua IPEI (*Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif*) yaitu indikator kemiskinan, sehingga dapat diasumsikan bahwa variabel kemiskinan tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan inklusif di Indonesia.

F. Hubungan Rasio Gini Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Masalah ketimpangan tentunya tidak terlepas dari pembahasan pembangunan ekonomi inklusif. Tingkat ketidaksetaraan yang tinggi, seperti yang tercermin dalam Gini ratio yang tinggi, dapat menjadi hambatan untuk pembangunan ekonomi inklusif. Ketidaksetaraan yang tinggi dapat mengarah pada pengalokasian sumber daya yang tidak merata, pembatasan akses terhadap peluang ekonomi, dan ketidaksetaraan dalam akses ke layanan dasar. Sebaliknya, upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dapat mendukung pembangunan ekonomi inklusif dengan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata didistribusikan di antara seluruh anggota masyarakat. Kebijakan yang mendorong inklusi keuangan, pendidikan, dan

pelatihan keterampilan, serta perlindungan sosial, dapat membantu menciptakan lingkungan di mana pemerataan pembangunan ekonomi lebih merata dan memberikan manfaat kepada lebih banyak orang.

Dalam penelitian yang dilakukan Sejati, (2024) dan (Azizah, 2022) menyatakan bahwa gini ratio memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Jika gini rasio tinggi maka itu akan menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dan juga sebaliknya jika gini rasio yang rendah maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif.

G. Hubungan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Menurut Todaro & Smith (2020), Komponen penting yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah pembangunan sumber daya manusianya, yang dilihat dari kualitas pendidikan dan kesehatan. Pada penelitian (Reza Rizki Ramadhan & Yaya Setiadi, 2019) juga menggunakan variabel RLS dengan hasil bahwa RLS signifikan terhadap indeks Pembangunan inklusifitas di Indonesia.

Penelitian ini penulis menggunakan variable pendidikan berupa rata-rata lama sekolah yang dimana pengambilan variabelnya mengacu pada pilar III, sub pilar pertama IPEI (*Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif*) yaitu kapabilitas manusia sehingga dapat diasumsikan bahwa variabel pendidikan berupa rata-rata lama Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

H. Hubungan Investasi Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

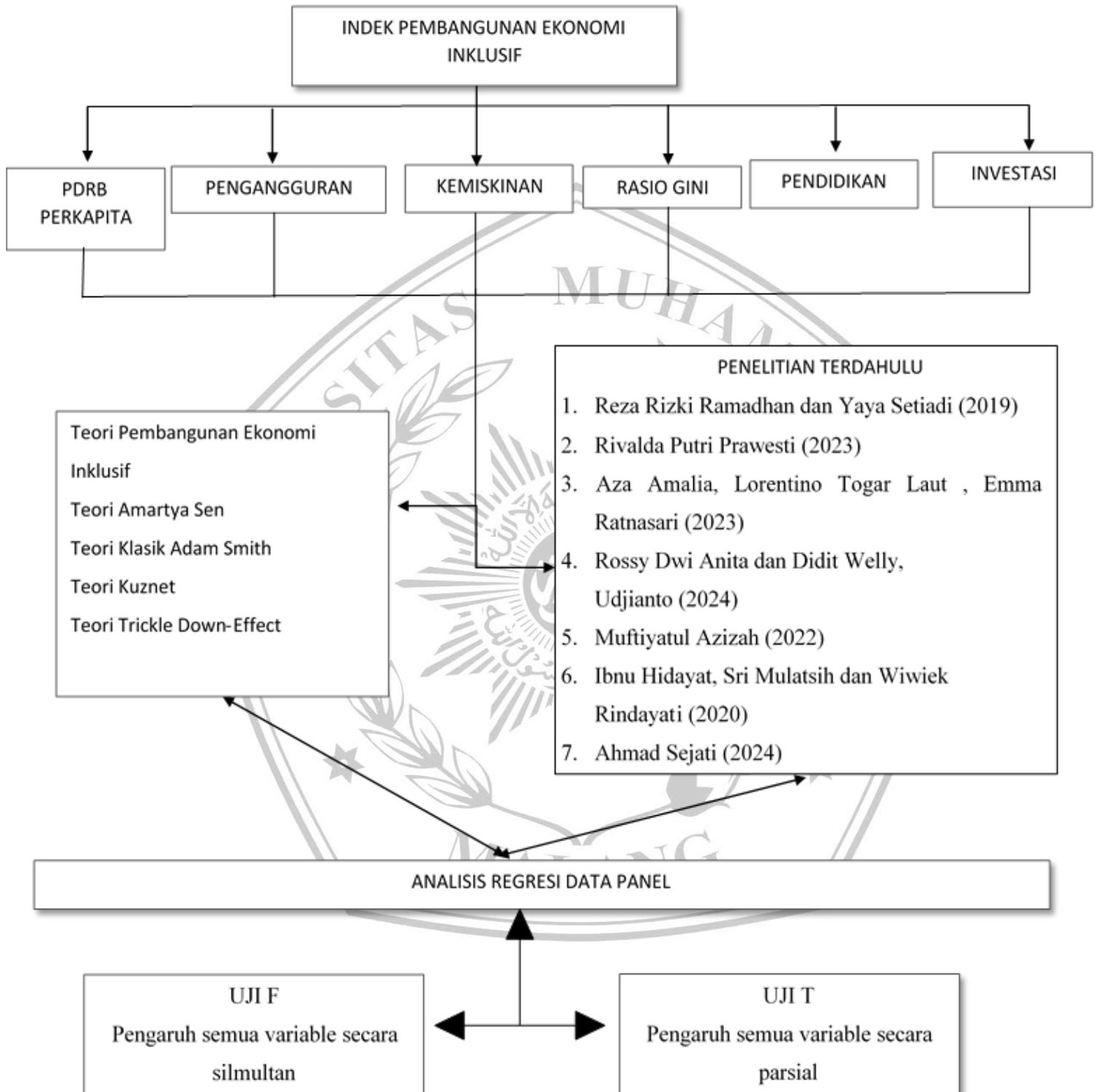
Dalam rangka upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dinilai sebagai langkah yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Makhfudz, 2016). Penanaman modal asing sebagai bentuk investasi dapat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana investasi akan meningkatkan produk teknologi dan keterampilan manajemen sehingga memberikan keuntungan dalam jangka panjang bagi

negara Indonesia, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Fitrianasari, 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Prawesti, 2023) dan (Hidayat et al., 2020) menyebutkan bahwa variable investasi berupa penanaman modal asing berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif. Dalam Penelitian ini penulis mengambil variable investasi yang berupa penanaman modal dalam negeri yang dalam pengambilan variabelnya mengacu pada pilar ke-III, Perluasan akses dan kesempatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa variable investasi (PMA) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif.



I. Kerangka Penelitian

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran



J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H_1 : Diduga semua variable dependent yaitu PDRB Perkapita, Pengangguran, Kemiskinan, Gini Ratio, Pendidikan dan Investasi mempunyai pengaruh signifikan secara parsial atau individu terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
2. H_2 : Diduga semua variable dependent yaitu PDRB Perkapita, Pengangguran, Kemiskinan, Gini Ratio, Pendidikan dan Investasi mempunyai pengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

